



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**RENJA PERUBAHAN
RENJA PERUBAHAN**

TAHUN 2022

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunianya telah dapat disusun Rencana Kerja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yang menggambarkan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja Perubahan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun kedua dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pegawai/staf dilingkungan Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu kepada setiap unit kerja dilingkungan Biro Administrasi Pimpinan diharapkan dapat mempedomani dan melaksanakan secara konsisten.

Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan salah satu tolak ukur peningkatan hasil kerja, dengan demikian Rencana Kerja Tahunan ini akan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Biro Administrasi Pimpinan.

Padang, Juli 2022
Kepala Biro Administrasi Pimpinan



Drs. Mafrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu	8
II.2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	
III.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	26
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel I	Hasil Pengukuran Kinerja Biro Administrasi Pimpinan	
	Tahun 2021	8
Tabel II	Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan	
	Tahun 2021	9
Tabel II	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021	14
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian	
	Renja OPD s.d Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat	15
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Administrasi Pimpinan	
	Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun	
	2022	28

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Biro Administrasi Pimpinan untuk perubahan Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, sehingga dalam penetapannya mengacu kepada Surat Edaran Gubernur nomor 050 /328/VP2EPD/Bappeda-2022 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai Bahan Penyusunan Perubahan Rancangan Kerja OPD Tahun 2022. Adapun, terkait dengan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada rencana program prioritas pada Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, demikian juga dengan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

Dokumen Renja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022 ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan pada Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021-2026 untuk menunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Untuk menjamin kesinambungan perencanaan, seluruh rencana kerja yang terkandung dalam Renja ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022, Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021-2026 dan Renja Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan. Dengan demikian, dokumen Renja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan 2022 ini merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dengan RKPD Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022, Renstra Biro Administrasi Pimpinan 2021-2026, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Selanjutnya berdasarkan nomenklatur OPD sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2019 Biro Administrasi Pimpinan hanya sebagai pendukung dari pencapaian tujuan misi ketujuh pembangunan Sumatera Barat dengan merumuskan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai berikut :

1. Koordinator dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Menciptakan pelayanan keprotokolan pimpinan yang handal, kompeten dan berkualitas;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan dan tamu pimpinan;
4. Menganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi mengawasi stabilitas pemberitaan penyelenggaraan informasi pembangunan daerah.
5. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media massa.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dokumen Renja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022 ini disusun merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 25 tahun 2022 tanggal 29 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-151-2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

I.3.2 Tujuan

Mendesripsikan program prioritas, program pendukung, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan pada Tahun Anggaran 2022 maka Tujuan dalam Penulisan Renja Perubahan Tahun 2022, sebagai Berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Periode tahun 2021- 2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Dearah Provinsi Sumatera Barat.

5. Menyediakan Dasar Pijakan dalam Penetapan, Pengendalian, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, Renja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022 disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam 4 (empat) Bab dimana masing-masing Bab mengandung substansi, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra Setda, dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

Bab III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan).

Bab IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN TAHUN 2021

Di tahun 2021, Biro Administrasi Pimpinan melaksanakan 1 Program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. **6.795.605.742,-**. Pada APBD Perubahan 2021, Biro Administrasi Pimpinan menambah anggaran pada 6 (enam) Sub kegiatan yaitu Penyiapan Materi Pimpinan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan, Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan sehingga *total Anggaran Biro Administrasi Pimpinan setelah perubahan* adalah Rp. **8.128.315.107,-**.

Secara umum, seluruh anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan guna mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang disepakati dalam dokumen penetapan kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD 2021-2026.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan.

Tabel I. Hasil Pengukuran Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	76,65	78,50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholder	76,65	77,12
3	Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Nilai Evaluasi akutanbilitas	80%	81,79%

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan diterapkan strategi yakni: Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Mengoptimalkan Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan melaksanakannya melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.128.315.107,- terrealisasi sebesar Rp. 7.816.043.362,- atau sebesar 96,16%

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2021, tersedia anggaran sebesar Rp. 8.128.315.107,- Hingga 31 Desember 2021, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 96,16% atau sebesar Rp. 7.816.043.362,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. Realisasi Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Th 2021	REALISASI		
			Fisik	Rp.	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	8,128,315,107	100.00	7,816,043,362	96,16
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,291,400	100.00	88,861,350	92.28
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,085,200	100.00	55,175,950	91.83
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,206,200	100.00	33,685,400	93.04
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126,244,100	100.00	120,382,200	95.36
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103,425,600	100.00	102,482,700	99.09
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	22,818,500	100.00	17,899,500	78.44
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,600,000	100.00	15,551,813	99.69
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah	15,600,000	100.00	15,551,813	99.69
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86,316,300	100.00	72,658,300	84.18
6.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	82,472,300	100.00	69,615,200	84.45
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,844,000	100.00	3,007,100	78.23
V	Kegiatan Administrasi Administrasi Pimpinan Perangkat Daerah	1,030,791,340	100.00	1,020,820,936	99.03
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218,708,500	100.00	217,016,787	99.23

9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112,272,500	100.00	112,222,400	99.96
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	32,760,500	100.00	32,760,000	100.00
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	241,220,000	100.00	241,220,000	100.00
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,829,840	100.00	417,601,749	98.07
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,813,200	100.00	44,460,000	99.21
13.	Pengadaan Mebel	44,813,200	100.00	44,460,000	99.21
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285,011,325	100.00	274,940,040	96.47
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,510,000	100.00	14,235,250	98.11
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,816,200	100.00	52,124,770	91.74
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Pimpinan Kantor	213,685	100.00	208,580,020	97.61
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252,370,000	100.00	234,709,990	93.00
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187,620,000	100.00	178,579,990	95.18
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,750,000	100.00	56,130,000	86.69
IX	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	2,703,072,275	100.00	2,620,744,270	96.95
19.	Penyiapan Materi Pimpinan	304,623,250	100.00	303,293,805	99.56
20.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,611,072,525	100.00	1,592,180,937	98.83
21.	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	787,376,500	100.00	725,269,528	92.11
X	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	3,487,805,167	100.00	3,322,914,463	95.27
22.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	815,010,967	100.00	791,690,478	97.14
23.	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,094,531,000	100.00	1,976,575,536	94.37
24.	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	578,263,200	100.00	554,648,449	95.92

Berikut Penjabaran dari pelaksanaan beberapa kegiatan pada biro Administrasi Pimpinan untuk tahun 2021 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 96,291,400,- yang ditujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah serta koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 88,861,350,- atau sebesar 92.28%. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 126,244,100,- yang ditujukan untuk penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir 2021 sudah terlaksana 100%, dengan realisasi Rp. 120,382,200,- atau sebesar 95.36%. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan persentase tertib administrasi keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 15,600,000,- yang ditujukan untuk pengamanan barang milik daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 15,551,813,- atau sebesar 78.44%. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase tertib administrasi barang milik daerah.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.83,316,300,-, yang ditujukan untuk Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai

Rp.72,658,300,- atau sebesar 78.23%. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1,030,791,340,-, yang ditujukan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1,020,820,936,- atau sebesar 99.03%. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.44,813,200,-. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan mebel. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp.44,460,000,- atau sebesar 99.21%. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 285,011,325,-. Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 274,940,040,- atau sebesar 96.47%. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.252,370,000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp.234,709,990,- atau sebesar 93,00 %. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik.

9. Kegiatan Fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,703,072,275,- yang digunakan untuk penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp.2,620,744,270,- atau sebesar 96,95 %. Hasil dari kegiatan ini adalah persentase penyiapan materi dan dokumentasi kegiatan pimpinan.

10. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Kegiatan ini dengan alokasi dana sebesar Rp. 3,487,805,167,-, yang digunakan untuk fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara, fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pengelolaan hubungan keprotokolan. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 sudah terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3,322,914,463,- atau sebesar 95.27 %. Hasil dari kegiatan ini adalah Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi.

Pada tahun 2021, Biro Administrasi Pimpinan telah berhasil melaksanakan seluruh program/kegiatan dengan capaian realisasi fisik 100% Dengan jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 7,816,043,362,- atau sebesar 96,16% dari total anggaran sebesar Rp. 8,128,315,107,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	9.940.624.000	8.082.971.204	81,31
2	2017	7.959.354.192	6.665.903.352	83,75
3	2018	11.985.179.220	10.732.463.682	89,55
4	2019	3.763.437.920	3.599.409.653	95,64
5	2020	5.115.237.318	4.978.591.099	97,33
6	2021	8,128,315,107	7,816,043,362	96,16
JUMLAH		38.763.832.650	34.059.338.990	87,86

II.2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renja OPD s.d Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama OPD: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2022) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	10,247,165,432		3,214,627,514		31.37
4 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	188,956,832		63,682,400		33.70
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	85,024,432	1 dokumen	43,344,400	50%	50.98

4	01	01	1	01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	27,898,600	1 dokumen	9,886,300	50%	35.44
4	01	01	1	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun	2 Dokumen	23,614,100	0	1,709,600	0%	7.18
4	01	01	1	01	04	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	2 Dokumen	18,538,300	1 dokumen	2,618,000	50%	14.12
4	01	01	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang disusun	2 Dokumen	17,912,500	0	1,988,600	0%	11.10
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja yang disusun	3 Dokumen	15,768,900	3 dokumen	4,135,500	100%	26.23
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	176,460,050		45,679,800		25.89
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	6 Orang	155,700,500	6 orang	41,235,800	100%	26.48
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disusun	3 laporan	20,759,550	2 laporan	4,444,000	67%	21.41
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	26,000,000		5,199,100		20.00

4	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	5 unit	26,000,000	5 unit	5,199,100	100%	20.00
4	01	01	1	05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	168,987,057	72,701,856	72,701,856		43.02
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN lingkup sekretariat daerah yang dilayani	400 ASN	143,031,557	200 ASN	72,701,856	50%	50.51
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 kali	25,055,500	0	0	0%	0.00
4	01	01	1	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	1,038,649,902	480,152,504	480,152,504		46.23
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	36 unit	283,923,440	20 unit	121,895,600	56%	42.93
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	3 jenis	36,056,600	3 jenis	14,198,600	100%	39.38
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5 jenis	29,778,750	5 jenis	20,100,000	100%	67.50
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan untuk lingkup sekretariat daerah	17 jenis	238,500,000	8 jenis	99,375,000	47%	41.67

4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 laporan	450,391,112	20 laporan	224,563,004	50%	49.86
4	01	01	1	07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	96,235,000		57,950,000		60.22
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	26 unit	96,235,000	22 unit	57,950,000	85%	60.22
4	01	01	1	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,359,282,560		573,922,174		42.22
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar	400 surat	10,850,000	200 surat	4,759,250	50%	43.86
4	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tegihan internet yang dibayarkan	10 mbps	93,579,000	10 mbps	38,135,828	100%	40.75
							Jumlah rekening tegihan telepon yang dibayarkan	1 rekening telepon		1 rekening telepon			
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	39 orang	1,254,853,590	39 orang	531,027,096	100%	42.32
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100%	209,996,000		75,016,750		35.72

4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit	183,276,000	2 unit	68,276,750	40%	37.25
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3 jenis	26,720,000	3 jenis	6,740,000	100%	25.22
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		80%	1,953,568,080		674,597,309		34.53
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Buku Himpunan pidato pimpinan Terlaksananya kegiatan rakor materi pimpinan lingkup OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota Terlaksananya survey data dan monitoring issue/benita melalui interagency media analytics (IMA)	150 buku 1 kali 12 bulan	313,415,860	0 1 kali 6 bulan	142,580,642	0% 100% 50%	45.49
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi kegiatan pimpinan melalui media cetak Publikasi kegiatan pimpinan melalui media luar ruang	38 kali 2 kegiatan	833,811,780	10 2 kegiatan	187,713,915	28% 100%	22.51

DPA Biro Administrasi Pimpinan untuk tahun 2022 sudah memakai dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Kegiatan dan Sub kegiatan. Secara keseluruhan, anggaran yang teralokasi pada Biro Administrasi Pimpinan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10,247,165,432,- untuk mendukung pelaksanaan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub kegiatan pada 10 (Sepuluh) Kegiatan dengan 1 (Satu) Program, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9,871,426,992,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 375,738,440,-. Kemudian Selama proses pelaksanaan kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah direalisasikan sebesar : 31.37% atau sebanyak Rp. 3,214,627,514,- dari total anggaran untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 10,247,165,432,-. Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2022 dapat dijabarkan di bawah ini, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi,

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai salah tugas dan fungsinya adalah pengkompilasian perencanaan dan penganggaran lingkup sekretariat daerah provinsi sumatera barat dan untuk pendanaannya terletak pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pada kegiatan ini menyokong terlaksananya perencanaan dan penganggaran lingkup Biro Administrasi Pimpinan dan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.188,956,832,- yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.63,682,400,- atau sebesar 33.70% dan realisasi fisik sampai dengan juni 2022 sebesar 29,24%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah dikarenakan keterlambatan dalam pencairan dana dan masih banyak pertanggungjawaban keuangan yang harus dilengkapi pada Biro Administrasi Pimpinan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.176,460,050,- yang ditujukan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas Asn dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.45,679,800,- atau sebesar 25,89% dengan realisasi fisik 28,00%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah dikarenakan keterlambatan dalam pencairan dana pada Biro Administrasi Pimpinan dan juga ada beberapa sub kegiatan yang memang pelaksanaan kegiatannya dibayarkan secara bulanan yang nantinya akan mempengaruhi releasi capain kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.26,000,000,- yang ditujukan untuk Pengamanan Barang Milik. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.5,199,100,- atau sebesar 20% dengan realisasi fisik sebesar 25,00%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah dikarenakan keterlambatan dalam pencairan dana pada Biro Administrasi Pimpinan dan juga dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini kebanyakan dimulai pada triwulan III dan IV yang merupakan pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan eselon II Biro Administrasi Pimpinan.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.168,987,057,- yang ditujukan untuk Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.72,701,856,- atau sebesar 43.02% dengan realisasi fisiki 3,00%. Dimana realisasi ini masih tergolong sudah cukup bagus pada Biro Administrasi Pimpinan dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi administrasi kepegawaian lingkup Biro Administrasi Pimpinan dan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1,038,649,902,- yang ditujukan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.480,152,504,- atau sebesar 46.23% dengan realisasi fisik 52,40%. Dimana realisasi ini masih tergolong cukup baik dikarenakan masih dalam proses penyerapan pada Biro Administrasi Pimpinan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.96,235,000,- yang ditujukan untuk Pengadaan Mebel. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.57,950,000,- atau sebesar 60.22% dengan realisasi fisik sebesar 75,50%. Dimana realisasi ini tergolong bagus pada Biro Administrasi Pimpinan dikarenakan Biro Administrasi Pimpinan sudah melaksanakan kegiatan pengadaan mebel sesuai dengan aliran kas yang telah ditetapkan pada DPA Biro Administrasi Pimpinan dan juga pengadaan mebel menjadi pengadaan yang prioritas untuk menunjang pelaksanaan aktifitas pada Biro Administrasi Pimpinan.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1,359,282,590,- yang ditujukan untuk Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.573,922,174,- atau sebesar 42.22% dengan realisasi fisik 46,67%. Dimana realisasi ini tergolong cukup bagus pada Biro Administrasi Pimpinan yang dikarenakan pada kegiatan merupakan sub kegiatan yang harus dilaksanakan dan dibayarkan secara bulanan yang mengakibatkan pencapaian realisasi kinerja menjadi cepat terlaksananya.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.209,996,000,- yang ditujukan untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.75,016,750,- atau sebesar 35.72% dengan realisasi fisiki sebesar 38,13%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah pada Biro Administrasi Pimpinan yang dikarenakan pembagian UP untuk Biro Administrasi Pimpinan yang masih tergolong kecil dengan total anggaran yang kurang lebih 10 miliar sehingga untuk pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan masih memberlakukan sistem pengecekan kelengkapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan yaitu Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang untuk tahun 2022 ini ditargetkan sebesar 80% yang diperoleh dari 3 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyiapan materi pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitas komunikasi pimpinan, dan Sub Kegiatan Pengelolaan dokumentasi pimpinan. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1,953,568,080,- yang ditargetkan untuk memenuhi indikator kinerja yaitu Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.674,597,309,- atau sebesar 34.53% dengan realisasi fisik sebesar 48,67%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah pada Biro Administrasi Pimpinan dikarenakan masih banyak kegiatan yang akan direncanakan dilaksanakan pada triwulan III dan IV yang nantinya akan mempengaruhi realisasi. Untuk realisasi keuangan memang masih rendah tetapi untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan bisa dikatakan sudah hampir tidak ada anggaran lagi dikarenakan pada Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meliput dan mendokumentasikan semua kegiatan pimpinan yang selama tahun 2022 sudah sebanyak lebih kurang 100 dokumentasi kegiatan pimpinan

10. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Amdministrasi Pimpinan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dengan target untuk tahun 2022 yaitu predikat B dengan target nilai 78,85. Dengan didukung oleh 3 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara, Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Sub Kegiatan Pengelolaan hubungan keprotokolan. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.5,029,029,921,- yang ditujukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan. Indeks ini diporeleh dengan penyebaran kuisioner kepda semua tamu pimpinan dan OPD ataupun lembaga yang membutuhkan layanan keprotokolan sehingga realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu Triwulan II mencapai Rp.1,165,725,621,- atau sebesar 23.18% dengan realisasi fisiki 33,43%. Dimana realisasi ini masih tergolong rendah pada Biro Administrasi Pimpinan dikarenakan masih kurangnya ASN yang akan menyelesaikan adminsitration keuangan pada bagian ini dan juga masih banyaknya pertanggungjawaban keuangan yang masih kurang dimengerti yang membuat lambatnya realisasi keuangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

III.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Biro Administrasi Pimpinan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021 dan pelaksanaan sepenuhnya baru dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021 kemudian untuk pendanaan pada Biro Administrasi Pimpinan untuk tahun 2022 sepenuhnya sudah dengan kondisi Biro Administrasi Pimpinan yang terdiri dari 3 bagian yang mendukung tugas dan fungsi Biro tersebut.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Biro Administrasi Pimpinan untuk Tahun 2022 yang diusulkan adalah sebesar Rp. 45.508.283.650,- (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dimana pada Rancangan Renja tahun 2022 sudah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tetapi Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan tahapan KUA PPAS terdapat pengurangan anggaran dari pengajuan RKPD yang kurang lebih 45 Miliar menjadi 10.247.165.432 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dimana pagu anggaran yang diberikan tahun 2022 masih merupakan pagu transisi dari pemulihan Covid-19 yang berimbas pada refocusing anggaran pada tahun 2021.

Tahapan KUA PPAS dimana untuk tahun 2022 dengan besaran pagu sebesar kurang lebih 10 Miliar tersebut tidaklah cukup untuk digunakan dalam pelayanan kegiatan pimpinan, tamu pimpinan dan keprotokolan pimpinan yaitu mulai awal tahun 2022 Sumatera Barat banyak sekali dikunjungi oleh Menteri-Menteri, Instansi Vertikal, DPR RI, DPD RI, kunjungan dari provinsi lain, dan tamu-tamu lainnya yang datang ke Provinsi Sumatera Barat selama Januari-Juni tahun 2022 yang mengakibatkan anggaran Biro Administrasi Pimpinan tidak cukup membiayainya sehingganya diharapkan pada anggaran perubahan mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan dengan baik.

Renja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022 memiliki 1 (satu) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera

Barat Tahun Anggaran 2022 ialah sebesar Rp. 10.247.165.432,- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
10. Fasilitasi Keprotokolan

berikut rincian kebutuhan Biro Administrasi Pimpinan Perubahan di tahun 2022 sebagai tercantum dibawah ini.

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	ALASAN PENAMBAHAN
		INDIKATOR	TARGET INDIKATOR R	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR R				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
4 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	10,247,165,432	16,683,278,788	6,436,113,356	
4 0 0 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	188,955,832	174,796,832	-14,170,000	
4 0 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	85,024,432	85,024,432	0	
4 0 0 1 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	27,899,600	21,373,600	-6,525,000	Pengurangan pada belanja lembur yang tidak terlaksana

4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20,778,750	45,120,000	16,341,250	Penambahan cetak Map OPD, Kwitansi, Blangko SPDP dan Blangko Disposisi (100 buku)
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	238,500,000	238,500,000	0	
4	0	1	1	1	6	6	0	0	0	0	450,391,112	716,922,762	266,531,650	Penambahan perjanjian dalam negeri dan luar negeri dalam rangka koordinasi dan pendampingan kegiatan pimpinan
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	96,235,000	139,917,500	43,682,500	
4	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	32,219,000	32,219,000	Munculnya sub kegiatan baru untuk pembelian kendaraan dinas roda dua dikarenakan kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	96,235,000	107,698,500	11,463,500	Penambahan pembelian kursi pejabat eselon IV
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,369,282,590	1,347,374,946	-11,907,644	

Pemerintahan Daerah		Pemerintahan daerah		urusan pemerintahan daerah						
4	0	0	1	0	0	400 surat	400 surat	10,850,000	10,850,000	0
	1	1	8	1		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar			
4	0	0	1	0	0	1 rekening telepon	1 rekening telepon	93,579,000	93,579,000	0
	1	1	8	2		Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan			
4	0	0	1	0	0	30 orang	35 orang	1,254,953,590	1,242,945,945	-11,907,644
	1	1	8	4		Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia			
4	0	0	1	0	0	100%	100%	209,998,000	330,430,000	120,434,000
	1	1	9			Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			
4	0	0	1	0	0	5 unit	5 unit	183,278,000	249,650,000	65,374,000
	1	1	9	2		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			
4	0	0	1	0	0	3 jenis	3 jenis	26,723,000	33,780,000	10,060,000
	1	1	9	6		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			
4	0	0	1	0	0					
	1	1	9	7		Jumlah Tiang Balho yang dipelihara	Jumlah Tiang Balho yang dipelihara			
4	0	0	1	0	0					
	1	1	9	7						
4	0	0	1	0	0					
	1	1	9	7						
4	0	0	1	0	0					
	1	1	9	7						

						<p>Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sekiranya membutuhkan anggaran lebih; seperti dengan hadirnya Menteri, Anggota DPR RI, Sekjen / Deputi sekaligus bersamaan seperti yang terjadi pada saat bencana alam yang menimpa Kab.Pasaman dan Pasaman Barat; hadir secara bersamaan, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial, Kepala BNPB, Anggota Komisi DPR RI, Gubernur DKI Jakarta di 3 Adanya Permintaan Pimpinan yang belum di akomodir pada anggaran sebelumnya sehingga dibutuhkan anggaran tambahan untuk mengakomodir keinginan pimpinan; seperti Wakil Gubernur berupa Paket Makanan Minuman Hari Raya Idul Fitri 600 Paket yang seandainya belum sepenuhnya bisa</p>
--	--	--	--	--	--	---

Pada tabel rencana kerja dan pendanaan untuk anggaran perubahan tahun 2022 Biro Administrasi Pimpinan terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan juga penambahan sub kegiatan baru yang hal ini juga dituangkan dalam nota persetujuan gubernur kepada Tim TAPD Provinsi Sumatera Barat. Penambahan anggaran lebih diutamakan pada kegiatan yang mendukung terlaksananya dan memfasilitasi kegiatan pimpinan yaitu untuk memfasilitasi tamu-tamu pimpinan, lembaga/opd yang membutuhkan keprotokolan, acara-acara hari besar nasional, dokumentasi kegiatan pimpinan, publikasi dan penyiapan materi pimpinan.

Penambahan anggaran juga terdapat pada sub kegiatan yang mendukung administrasi dan ketatausahaan biro administrasi pimpinan yaitu penambahan pembelian motor dikarenakan motor yang sekarang sudah tidak layak pakai untuk digunakan oleh carakan untuk keperluan administrasi dan surat menyurat Biro Administrasi Pimpinan. Kemudian untuk pembelian laptop, komputer, printer dan infocus serta perekam suara untuk kebutuhan kegiatan dokumentasi pimpinan dan penyelesaian administrasi pada Biro Administrasi Pimpinan. Penambahan anggaran untuk sub kegiatan cetak, logistic, pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan peralatan mesin kantor yang merupakan pendukung dari pelaksanaan administrasi Biro Administrasi Pimpinan dimana anggaran awal yang diberikan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun 2022 sehingga mengajukan penambahan anggaran.

Munculnya Sub Kegiatan Baru yaitu Pemeliharaan aset yaitu berupa pemeliharaan tiang baliho hal ini terjadi karena pada anggaran awal pemeliharaan tiang baliho ini dimasukkan kedalam sub kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan sehingga oleh tim verifikasi RKA tidak bisa di jalankan di karenakan untuk pemeliharaan tiang baliho harus diletakan pada sub bagian tata usaha sehingganya pemeliharaan tiang baliho baru bisa dilaksanakan sewaktu anggaran perubahan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Untuk mencapai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tujuan dan saran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen Renja Biro Administrasi Pimpinan merupakan faktor pendukung pencapaian kinerja yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas pendanaan/penganggaran serta aspek Sumberdaya Manusia. Mengingat aspek pendanaan dan SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga maka perlu pendanaan, kesejahteraan dan pengembangan karier. Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan, Renja ini menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Penambahan yang diharapkan oleh Biro Administrasi Pimpinan merupakan pendukung dari semua kegiatan Nasional dan Lokal yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga Tugas Pokok dan Fungsi dari Biro Administrasi Pimpinan bisa berjalan dengan maksimal.

Demikian Renja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.